



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR: KEP/HK/665 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 29 Desember 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	9
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	. 2
Kepala Bagian Hukum	71

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/665/2025  
 TANGGAL : 29 Desember 2025  
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 KEPALA DAERAH TAHUN 2026

FORMULIR USULAN RANPERKADA DALAM PROPEMPERKADA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peraturan Bupati	Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun 2027	Menjabarkan secara rinci APBD berdasarkan Perda yang telah ditetapkan: a. Pendapatan Daerah (rincian jenis-jenis penpatan: PAD, dana transfer, pendapatan lain-lain yang sah; perjenis, obyek, dan rincian obyek. b. Belanja Daerah (rincian belanja per: urusan pemerintahan, organisasi/SKPD,	BARU		Tahun 2026	BKAD	01/11/2026	Bidang Anggaran

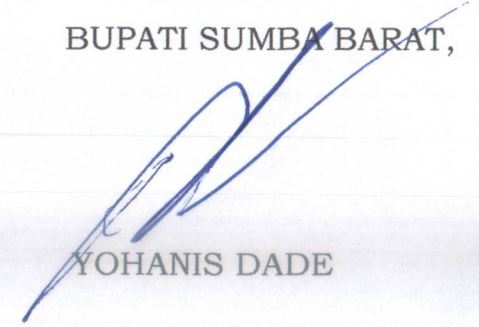
			program dan kegiatan, jenis belanja (operasi, modal, tidak terduga, transfer), program, kegiatan dan subkegiatan.					
			c. Pembiayaan Daerah (penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan).					
2	Perubahan Peraturan Bupati	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Perubahan rincian APBD berdasarkan Perda yang telah ditetapkan: a. perubahan Pendapatan Daerah (rincian jenis-jenis pendapatan: PAD, dana transfer, pendapatan lain-lain yang sah; perjenis, obyek, dan rincian obyek. b. perbuahan Belanja Daerah (rincian belanja per: urusan pemerintahan, organisasi/SKPD, program dan kegiatan,	UBAH	Tahun 2026	BKAD	01/10/2026	Bidang Anggaran

			<p>jenis belanja (operasi, modal, tidak terduga, transfer), program, kegiatan dan subkegiatan.</p> <p>c. perubahan Pembiayaan Daerah (penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan).</p>						
3	Peraturan Bupati	Standar harga satuan 2027	Daftar harga satuan tertinggi barang/ jasa dan standar biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu jenis kegiatan sesuai kewajaran beban kerja.	BARU		Tahun 2026	BKAD	01/06/2026	Bidang Anggaran
4	Peraturan Bupati	Juknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada PNS kabupaten Sumba Barat Tahun 2026	<p>Pedoman bagi OPD, khususnya Badan Keuangan dan Asset Daerah, dalam melaksanakan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang berisi :</p> <p>a. penerima;</p>	BARU		Tahun 2026	BKAD	01/04/2026	Bidang Permbendaharaan

			b. komponen gaji/tunjangan yang diterima; c. tata cara pembayaran.						
5	Peraturan Bupati	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025-2029	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025-2029	BARU		Tahun 2026	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumba Barat		
6	Peraturan Bupati	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, perlu dilakukan pembakuan dan penyamaan format Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BARU		Tahun 2026	Bagian Organisasi	08/01/2026	
7	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis	tindak lanjut atas adanya peningkatan status satuan Pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat dan		UBAH	Tahun 2026	Bagian Organisasi	08/01/2026	

		Daerah Pendidikan pada Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Sumba Barat	Satuan Formal Dinas dan Kabupaten	sebagai persyaratan administrasi dalam Data Dapodik						
--	--	--	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

BUPATI SUMBA BARAT,



YOHANIS DADE

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	1
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2
Kepala Bagian Hukum	1